

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 KONDISI UMUM ORGANISASI

**B**iro Hukum, Organisasi dan Humas Badan Standardisasi Nasional (Biro HOH) dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Biro HOH merupakan unsur penunjang Badan Standardisasi Nasional yang berkedudukan dibawah koordinasi Sekretaris Utama. Biro HOH mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN dalam menyediakan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, melakukan pengelolaan sumber daya manusia, serta memberikan informasi, dokumentasi dan publikasi tentang BSN.

Berdasarkan Pasal 25 Keputusan tersebut, Biro HOH-BSN mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.

LAKIP Biro HOH Tahun 2015 merupakan bentuk dokumen pertanggungjawaban berdasarkan pada :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
2. Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010
3. Surat Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) Nomor 239 Tahun 2013.

LAKIP Biro HOH ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang timbul dan mungkin akan timbul (deteksi dini) yang menyangkut kondisi internal dan eksternal baik regional, nasional maupun Internasional.

Selanjutnya dengan tersusunya LAKIP Biro HOH, maka diharapkan dapat :

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Biro HOH.
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama baik dengan unit eselon II lingkup kesestamaan maupun seluruh unit kerja yang ada dilingkungan BSN. Sehingga kerjasama dengan manajemen kinerja berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan, mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja hingga evaluasi kinerja.
3. Menyelenggarakan tugas – tugas pemerintahan dengan baik dan benar serta transparan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

## **A. KELEMBAGAAN**

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Biro HOH BSN. Kelembagaan menyangkut aspek tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

### **A.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro HOH BSN**

Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi, serta organisasi Biro HOH BSN adalah sebagai berikut.

#### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

Biro HOH BSN mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Biro HOH BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan analisa, pengkajian, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. Pelaksanaan penataan, evaluasi dan perumusan organisasi dan tata laksana serta pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal;
- f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

#### **b. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, struktur organisasi Biro HOH BSN terdiri dari :

**Bagian Hukum** Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis, pengkajian, penelaahan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi dan pemberian informasi hukum serta bantuan dan penyuluhan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisa dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum;
- c. pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi Perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan

Hukum dan Perundang-undangan di bidang standardisasi.

**Bagian Organisasi dan Kepegawaian** Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan analisis, penataan organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan evaluasi penerapan manajemen mutu internal, serta melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

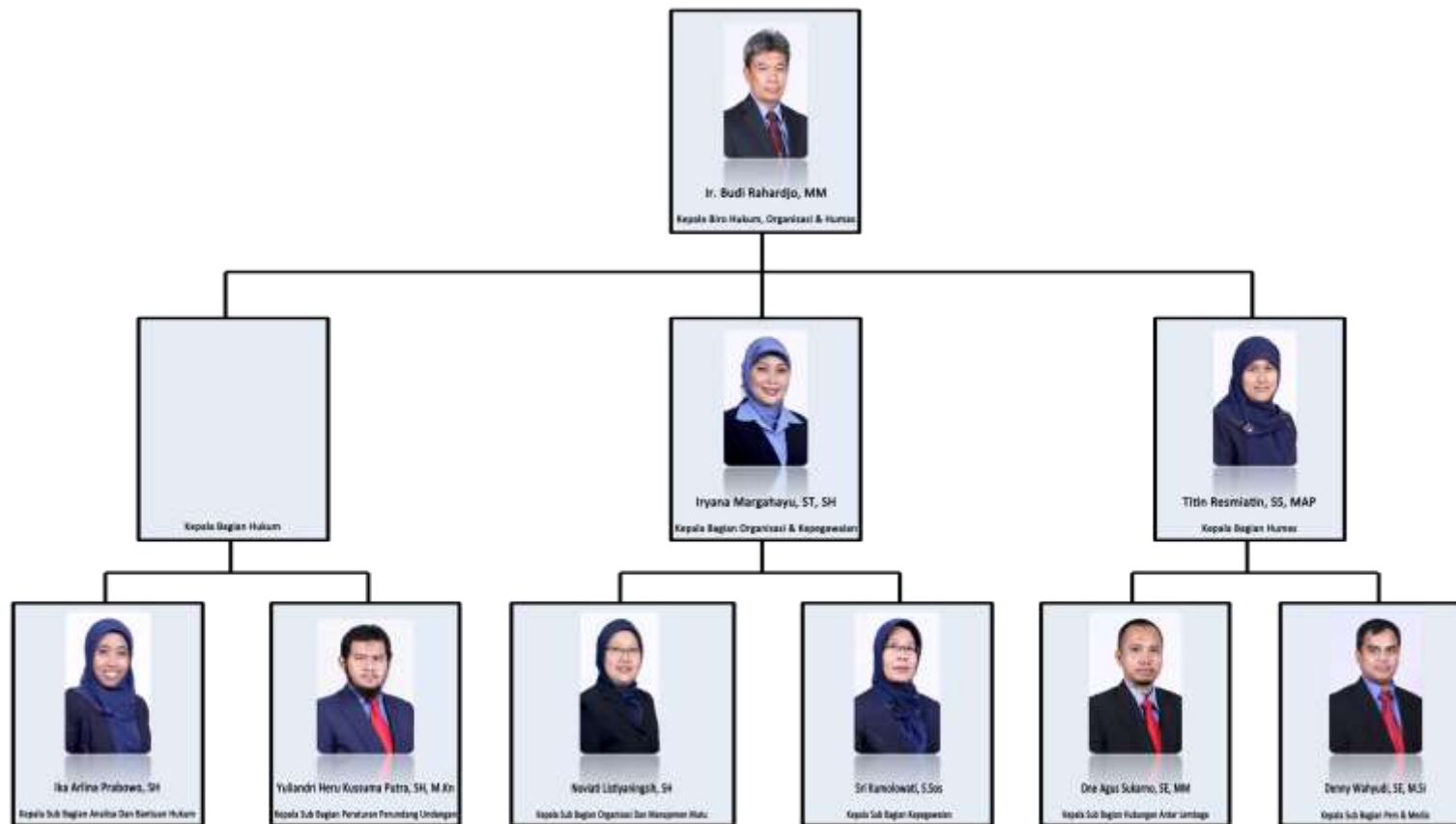
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan analisa, evaluasi dan perumusan struktur organisasi dan tata laksana;
- b. pengawasan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan Manajemen Mutu Internal;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

**Bagian Humas** Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga serta dokumentasi dan publikasi kegiatan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Humas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan urusan hubungan pers dan media massa;
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Hukum, Organisasi dan Humas

## B. Sumber Daya Manusia Biro HOH BSN

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2015 Biro HOH BSN memiliki personel sebanyak 32 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel B.1 Pegawai Biro HOH**

No	Unit Kerja	Jumlah Orang
1.	Kepala Biro	1
1.	Bagian Hukum	6
2.	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	14
3.	Bagian Hubungan Masyarakat	11
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>

**Grafik B.1 Jenjang Pendidikan SDM Biro HOH**



**Tabel B.2 Kualifikasi Jabatan dan Kepangkatan berdasarkan Usia**

Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Jabatan (Orang)						Fungsional Umum (Orang)
		Eselon II		Eselon III		Eselon IV		
		IV/C	IV/B	IV/A	III/D	III/C	III/B	
56 - 60	1	1						
51 - 55	1				1			
46 - 50								
41 - 45	3		1	1	1			
36 - 40	5				2			3
31 - 35	5						1	4
26 - 30	13					1		12
20 - 25	4							4

## **C. PERAN STRATEGIS BIRO HOH BSN**

Biro HOH sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, di bidang legislasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kehumasan.

### **I.2 PERMASALAHAN UTAMA**

Pada Tahun 2015 Biro Hukum Organisasi Humas menghadapi tantangan yang cukup besar dengan tidak tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan pada Penetapan kinerja Biro HOH Tahun 2015 antara lain :

1. Adanya kebijakan penghematan Belanja Perjalanan Dinas dan Paket meeting/konsinyering Kementerian/Lembaga dimana BSN harus merevisi Anggaran sehingga mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan.
2. Belum ditetapkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini disebabkan draf tersebut masih dalam proses pembahasan oleh Panitia Antar Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian (PAK).
3. Belum terselesaikannya struktur organisasi BSN yang Baru sebagai Implementasi amanah UU No.20 Tahun 2014. Saat ini masih dalam proses penyusunan draft struktur organisasi BSN yang baru dan pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
4. Belum terpenuhinya target penetapan 19 Rancangan Peraturan Kepala BSN. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya draf Rancangan oleh Unit pengusul sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

**D**alam upaya mencapai sasaran strategis Biro HOH BSN seperti yang tertera dalam Rencana Strategis periode 2010-2015, maka Biro HOH BSN menetapkan arah kebijakan strategis sebagai acuan langkah-langkah penyusunan target outcome program dan target output kegiatan. Sejalan dengan itu maka dirumuskan visi dan misinya sebagai berikut :

Rencana Strategis Biro HOH BSN 2015 - 2019 secara rinci diuraikan sebagai berikut.

#### VISI

“Menjadi unit yang dapat mewujudkan kepastian hukum, pelayanan kepegawaian dan pemberian informasi publik dalam mendukung koordinasi dan pelayanan di BSN .”

#### MISI

1. Menyediakan peraturan perundang – undangan dan pengkajian hukum dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Memberikan pelayanan prima kepegawaian BSN
3. Melakukan penataan organisasi dan tatalaksana BSN
4. Melakukan pelayanan informasi kelembagaan kepada masyarakat, pers media serta antar lembaga

#### TUJUAN

Mewujudkan tata kelola peraturan perundangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, SDM yang berkualitas serta informasi kelembagaan yang akurat dan akuntabel.

#### SASARAN

Pada tahun 2015 sasaran Biro HOH BSN adalah :

1. Tersusunnya peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Terwujudnya produk hukum BSN.
3. Terwujudnya paket pengembangan SDM sesuai analisis kebutuhan.



4. Terwujudnya paket paket publikasi kelembagaan.
5. Tersusunnya laporan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi

## KEBIJAKAN

Penerapan Sistem Manajemen Mutu Secara Menyeluruh

## PROGRAM

1. Program Pengembangan Standardisasi Nasional;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN;

### II.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah penetapan kinerja Biro HOH BSN tahun 2015 berdasarkan sasaran yang telah disempurnakan untuk memenuhi perspektif *stakeholder* :

**Tabel II.2 Penetapan Kinerja Biro HOH BSN Tahun 2015**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015
1.	Terwujudnya peraturan perundang – undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.	a. Jumlah PP dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	2 PP
		b. Jumlah Perpres	2 Perpres
2.	Terwujudnya produk hukum BSN.	c. Jumlah peraturan Kepala BSN	19 Dokumen
		d. Persentase usulan keputusan Kepala BSN yang diselesaikan	90%
		e. Jumlah Penyuluhan Hukum	10 Kali
		f. Database Informasi Hukum	1 Paket
		g. Jumlah Kajian Hukum	2 Kajian
3.	Terwujudnya paket pengembangan SDM sesuai analisis kebutuhan.	h. Jumlah SDM yang mengikuti Diklatpim dan Prajabatan	106 Orang
		i. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis	406 Orang
		j. Analisa Kebutuhan pelatihan	1 Dokumen
		k. Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen
		l. Draft Pedoman Jabatan Fungsional Standardisasi	1 Dokumen
		m. Jumlah SOP Bidang Kepegawaian	12 Dokumen

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2015</b>
4.	Terwujudnya Paket Publikasi Kelembagaan	n. Jumlah Pemberitaan Kelembagaan BSN di Website dan Media Massa	1.000 Berita
		o. Jumlah keikutsertaan pameran BSN	5 Kali
		p. Jumlah koordinasi kelembagaan dan antar lembaga	19 Kali
		q. Jumlah dokumen laporan tahunan	1 Dokumen
5.	Tersusunnya Laporan Capaian Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	r. Jumlah laporan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi	1 Laporan
		s. Jumlah laporan hasil Survei evaluasi kelembagaan	1 Laporan

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro HOH BSN menetapkan 5 (lima) sasaran yang telah disempurnakan dari sasaran sebelumnya, dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Pada triwulan III Tahun 2015, menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BSN telah menyempurnakan Indikator Kinerja Utama yang berdampak pada penyempurnaan indikator kinerja Sekretariat Utama dan Biro Hukum Organisasi dan Humas.

Adapun sasaran Biro HOH dan indikator kinerja sasaran yang telah disempurnakan adalah sebagai berikut :

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
1. Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian	Indeks kepuasan layanan kepegawaian dengan skala 1-100
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan	Indeks kepuasan internal kelembagaan BSN dengan skala 1-100
3. Meningkatnya kualitas layanan hukum	Indeks kepuasan layanan hukum dengan skala 1-100
4. Meningkatnya kualitas layanan e-gov	Indeks kepuasan penerapan e-govt dalam pelaksanaan Tusi HOH
5. Meningkatnya kualitas Layanan informasi publik	Indeks kepuasan layanan informasi publik dengan skala 1-100
6. Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan RB	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan RB untuk 8 area perubahan
7. Tersedianya peraturan perundangan-undangan	7.1. Prosentase Peraturan Kepala BSN yang ditetapkan dari usulan
	7.2. Prosentase Keputusan Kepala BSN yang ditetapkan dari usulan

SASARAN	INDIKATOR
8. Meningkatnya kualitas SDM yang kompeten	Prosentase SDM BSN yang nilai SKPnya > 80 (baik)
9. Meningkatnya kompetensi SDM BSN	Prosentasi SDM BSN yang meningkat kompetensinya

Mengingat Perjanjian kinerja tersebut disusun pada akhir Tahun 2015 sementara pelaksanaan kegiatan Biro HOH indikator kinerja sasarannya mengacu pada perjanjian kinerja yang lama oleh karena itu perjanjian kinerja yang dapat diukur adalah terjelaskan pada matriks berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara mengukur capaian Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya peraturan perundang – undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.	a. Jumlah PP dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Menghitung jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang ditetapkan Presiden menjadi Peraturan Pemerintah (PP)
		b. Jumlah Perpres	Menghitung jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPerpres) yang ditetapkan Presiden menjadi Peraturan Presiden (Perpres)
2.	Terwujudnya produk hukum BSN	c. Jumlah peraturan Kepala BSN	Menghitung jumlah Peraturan Kepala BSN yang ditetapkan
		d. Persentase usulan keputusan Kepala BSN yang diselesaikan	Keputusan Kepala BSN usulan keputusan kepala BSN x 100%
		e. Jumlah Penyuluhan Hukum	Menghitung jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan
		f. Database Informasi Hukum	Menyusun database Informasi Hukum yang dibuat BSN
		g. Jumlah Kajian Hukum	Menghitung jumlah Kajian Hukum yang dilaksanakan
3.	Terwujudnya paket pengembangan SDM sesuai analisis kebutuhan	h. Jumlah SDM yang mengikuti Diklatpim dan Prajabatan	Menghitung jumlah SDM yang diikutsertakan dalam Diklatpim dan Prajabatan
		i. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis	Menghitung jumlah pegawai yang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara mengukur capaian Indikator Kinerja
			diikutsertakan dalam Diklat Teknis
		j. Analisa Kebutuhan pelatihan	Menghitung Analisa Kebutuhan pelatihan yang akan dilaksanakan
		k. Standar Kompetensi Jabatan	Menghitung Standar Kompetensi Jabatan yang disusun
		l. Draft Pedoman Jabatan Fungsional Standardisasi	Menghitung Draft Pedoman Jabatan Fungsional Standardisasi yang disusun
		m. Jumlah SOP Bidang Kepegawaian	Menghitung Jumlah SOP Bidang Kepegawaian yang disusun
4.	Terwujudnya Paket Publikasi Kelembagaan	n. Jumlah Pemberitaan Kelembagaan BSN di Website dan Media Massa	Menghitung Jumlah pemberitaan kelembagaan BSN yang ada di media massa dan website BSN.
		o. Jumlah keikutsertaan pameran BSN	Menghitung Jumlah keikutsertaan pameran yang diikutsertakan BSN.
		p. Jumlah koordinasi kelembagaan dan antar lembaga	Menghitung Jumlah koordinasi kelembagaan dan antar lembaga yang dilaksanakan BSN.
		q. Jumlah dokumen laporan tahunan	Menghitung Jumlah dokumen laporan tahunan yang disusun
5.	Tersusunnya Laporan Capaian Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	r. Jumlah laporan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi	Menghitung Jumlah laporan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi
		s. Jumlah laporan hasil Survei evaluasi kelembagaan	Dilaksanakan survei evaluasi kelembagaan kepada pelanggan BSN

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Biro HOH BSN telah melaksanakan 2 (dua) program dengan 5 (Lima) kegiatan.

Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- I. **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, melalui kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dilaksanakan melalui :

Penyusunan dokumen Peraturan Pemerintah (PP) di bidang standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yaitu PP tentang standarisasi dan PP tentang penilaian kesesuaian.

**II. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN**, melalui kegiatan:

**Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN**, dilaksanakan melalui :

- a. Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Produk Hukum terkait standarisasi,
- b. Pengelolaan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum,
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia BSN sesuai analisa kebutuhan ,
- d. Publikasi kelembagaan yang berkualitas, dan
- e. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA



kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro HOH BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

#### III.1 Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Biro HOH BSN, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja.

Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2015 berdasarkan Penetapan Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Biro HOH BSN Tahun 2015**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
I	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standarisasi dan penilaian kesesuaian</b>				
1.	Terwujudnya peraturan perundang – undangan dibidang standarisasi dan penilaian	a. Jumlah RPP dibidang standarisasi dan penilaian kesesuaian	2 RPP	2 RPP	75%
		b. Jumlah RPerpres	2 RPerpres	2 R Perpres	50%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian</b>				
2.	Terwujudnya produk hukum BSN	c. Jumlah peraturan Kepala BSN	19 Dokumen	13 Dokumen	68%
		d. Persentase usulan keputusan Kepala BSN yang diselesaikan	90%	90%	100%
		e. Jumlah Penyuluhan Hukum	10 Kali	10 Kali	100%
		f. Database Informasi Hukum	1 Paket	1 Paket	100%
		g. Jumlah Kajian Hukum	2 Kajian	2 Kajian	100%
3.	Terwujudnya paket pengembangan SDM sesuai analisis kebutuhan	h. Jumlah SDM yang mengikuti Diklatpim dan Prajabatan	106 Orang	87 Orang	80%
		i. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis	406 Orang	349 Orang	86%
		j. Analisa Kebutuhan pelatihan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		k. Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		l. Draft Pedoman Jabatan Fungsional Standardisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		m. Jumlah SOP Bidang Kepegawaian	12 Dokumen	12 Draft SOP	90%
4.	Terwujudnya Paket Publikasi Kelembagaan	n. Jumlah Pemberitaan Kelembagaan BSN di Website dan Media Massa	1.000 Berita	921 Berita	92%
		o. Jumlah keikutsertaan pameran BSN	5 Kali	16 Kali	312%
		p. Jumlah koordinasi kelembagaan dan antar lembaga	19 Kali	19 Kali	100%
		q. Jumlah dokumen laporan tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	Tersusunnya Laporan Capaian Pelaksanaan Program Reformasi	r. Jumlah laporan capaian pelaksanaan program reformasi	1 Laporan	1 Laporan	89%

N O	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
I	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian</b>				
	Birokrasi	birokrasi			
		s. Jumlah laporan hasil Survei evaluasi kelembagaan	1 Laporan	1 Laporan	89%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### TUJUAN :

**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian**

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Terwujudnya peraturan perundang – undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Terwujudnya produk hukum BSN
3. Terwujudnya paket pengembangan SDM sesuai analis kebutuhan
4. Terwujudnya Paket Publikasi Kelembagaan
5. Tersusunnya Laporan Capaian Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi

Pencapaian dari tiap – tiap sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

<b>SASARAN 1</b>	<b>Terwujudnya peraturan perundang – undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.</b>
----------------------	--

**Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Capaian 2015		
	Target	Realisasi	Capaian
a. Jumlah PP dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	2 RPP	2 RPP	75%
b. Jumlah Perpres	2 RPerpres	2 R Perpres	50%



Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur Terwujudnya peraturan perundang – undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pencapaian target pada Tahun 2015 untuk sasaran pertama tidak mencapai target 100% yang ditetapkan yaitu tersusun dan ditetapkannya 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) terkait standardisasi dan Penilaian kesesuaian dan 2 (dua) Peraturan Presiden tentang Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan indikator kinerja tidak tercapainya kedua target indikator kinerja diatas antara lain :

- a. Proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian oleh Panitia Antar Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian (PAK) belum mendapatkan kesepakatan untuk diharmonisasikan. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan materi standar personal, lembaga penilaian kesesuaian, pembinaan masyarakat dan sanksi administratif.
- b. Proses lelang kegiatan sosialisasi UU No.20 Tahun 2014 tentang SPK baru dilaksanakan pada triwulan III sehingga pelaksanaan sosialisasi yang direncanakan dimulai pada triwulan kedua mengalami kemunduran menjadi triwulan ketiga.
- c. RPerpres pembentukan BSN dan RPerpres pembentukan KAN masih dalam tahap pembahasan Panitia Antar Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian (PAK) sehingga belum dapat ditetapkan pada tahun 2015.

Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2015 pencapaian dari kedua indikator kinerja diatas adalah sebesar 62,5% dari target penetapan 100%

Kegiatan yang paling mendapatkan perhatian oleh stakeholder BSN salah satunya adalah dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Undang – Undang No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) di 6 (Enam) kota diantaranya Palembang, Padang, Pontianak, Banyuwangi, Sukabumi dan Jakarta.

Sosialisasi ini dilaksanakan BSN sebagai upaya untuk menyebarluaskan Undang – Undang No.20 Tahun 2014 kepada seluruh masyarakat sehingga tercipta pemahaman yang

baik mengenai UU tersebut dan memudahkan penerapan UU tersebut oleh para pihak yang berkepentingan.

Tahun 2016 Biro HOH sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja tersebut diatas akan dilakukan :

1. Rapat Harmonisasi RPP turunan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Sosialisasi UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk mendapatkan masukan dan tanggapan guna pengambilan kebijakan pimpinan BSN dan peningkatan kinerja BSN.

Dengan harapan ditahun – tahun mendatang target yang dihasilkan pada sasaran pertama ini dapat tercapai.

<b>SASARAN</b>  <b>2</b>	<b>Terwujudnya Produk Hukum</b>
--------------------------------	---------------------------------

**Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Capaian 2015		
	Target	Realisasi	Capaian
c. Jumlah peraturan Kepala BSN	19 Dokumen	13 Dokumen	68%
d. Persentase usulan keputusan Kepala BSN yang diselesaikan	90%	90%	100%
e. Jumlah Penyuluhan Hukum	10 Kali	10 Kali	100%
f. Database Informasi Hukum	1 Paket	1 Paket	100%
g. Jumlah Kajian Hukum	2 Kajian	2 Kajian	100%

Tahun 2015 pencapaian sasaran terwujudnya produk hukum BSN dari 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan target yang tidak mencapai 100% adalah Jumlah peraturan Kepala BSN yang ditargetkan 19 Dokumen yang ditetapkan oleh Kepala BSN namun sampai dengan akhir Tahun 2015 hanya mencapai 13 Dokumen atau sebesar 68%.

Kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan ini untuk mencapai target indikator kinerja ini adalah :

- a. Terdapat beberapa Raperka BSN yang akan ditetapkan pada Tahun 2015 belum tersedia draf atau rancangan awal dari Pengusul sehingga tidak dapat dibahas dan ditetapkan Tahun 2015.
- b. Terdapat beberapa Peraturan Kepala BSN yang ditetapkan Tahun 2015 merupakan Raperka yang tidak masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Kepala BSN Tahun 2015 sehingga penyelesaian Raperka BSN yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Kepala BSN Tahun 2015 menjadi tidak maksimal.

Oleh karena itu langkah tindak lanjut yang akan dilakukan pada Tahun 2016 Bagian Hukum akan terus berupaya:

- a. Memasukkan Raperka BSN yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Kepala BSN Tahun 2015 yang belum selesai pada Prgoram Penyusunan Peraturan Kepala BSN Tahun 2016 dan melanjutkan proses pembahasan dan penetapannya.
- b. Melakukan monitoring pada pelaksanaan Program Penyusunan Peraturan Kepala BSN Tahun 2016 supaya fokus pada penyelesaian Raperka BSN yang masuk dalam program.

<b>SASARAN</b>	<b>3</b>	<b>Terwujudnya paket pengembangan SDM sesuai analisis kebutuhan</b>

**Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Capaian 2015		
	Target	Realisasi	Capaian
h. Jumlah SDM yang mengikuti Diklatpim dan Prajabatan	106 Orang	87 Orang	82%
i. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis	406 Orang	349 Orang	86%
j. Analisa Kebutuhan pelatihan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
k. Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
l. Draft Pedoman Jabatan Fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tahun 2015 pencapaian sasaran terwujudnya paket pengembangan SDM sesuai analisis kebutuhan dari 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan target yang tidak mencapai 100%

adalah Jumlah SDM yang mengikuti Diklatpim dan Prajabatan yang ditargetkan 106 Orang namun sampai dengan akhir Tahun 2015 hanya mencapai 87 Orang atau sebesar 82%, dan Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis. yang ditargetkan 406 Orang namun sampai dengan akhir Tahun 2015 hanya mencapai 349 Orang atau sebesar 86%.

Penyebab dari tidaknya kedua indikator kinerja diatas tidak melampaui target yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 ini disebabkan :

- a) Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV dengan target 7 (tujuh) peserta tidak dapat dilaksanakan karena Informasi kuota penuh dari instansi penyelenggara mendekati hari pelaksanaan diklat (memprioritaskan peserta dari penyelenggara). Sudah diusahakan dialihkan ke instansi lain seperti Ke Kementerian Pertanian namun kuota penuh dan Kementerian Komunikasi dan Informatika namun tidak dapat menerima pembayaran melalui PNBP.
- b) Training belum berdasarkan analisa kebutuhan yang tepat untuk setiap personil karena belum tersusunnya standar kompetensi jabatan. Sehingga pelaksanaan training masih berdasarkan usulan kebutuhan unit kerja yang kemudian dianalisa kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi unit kerja serta ketersediaan anggaran.
- c) Belum adanya pedoman yang mengatur penyelenggaraan diklat di BSN.

Oleh karena itu pada Tahun 2016 mendatang langkah – langkah yang akan dilaksanakan untuk pencapaian target diantaranya :

- 1) Memonitor setiap pelaksanaan Diklatpim yang ditawarkan oleh K/L yang menyelenggarakan Diklat tersebut.
- 2) Penyelesaian penyusunan standar Kompetensi Jabatan.
- 3) Akan dilakukan asesmen kepada seluruh pegawai.
- 4) Akan dilakukan tallent pool yaitu beberapa pegawai yang dinilai bertalenta yang jumlahnya kecil dan ditentukan yang menunjukkan superior performance atau istimewa lain dari pada yang lain, yang menjadi panutan atau cermin bagi karyawan lain dalam kehidupannya bukan hanya spesifik di pekerjaannya, lebih cenderung patokan perilaku (tindak tanduk) bagi pegawai BSN sesuai nilai-nilai yang dianut oleh sebuah perusahaan.
- 5) Penyusunan pedoman penyelenggaraan diklat untuk pegawai BSN.

Sementara itu target pencapaian kinerja yang telah mencapai target 100% Biro Hukum, Organisasi dan Humas (HOH) khususnya bagian organisasi dan kepegawaian akan terus memperbaharui mengingat kebutuhan yang diinginkan seluruh pegawai BSN bersifat dinamis dan terbarukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB) ataupun Badan Kepegawaian Negara (BKN).

<b>SASARAN</b>	<b>4</b>	<b>Terwujudnya Paket Publikasi Kelembagaan</b>
----------------	----------	--

**Tabel III.5 Capaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Capaian 2015		
	Target	Realisasi	Capaian
n. Jumlah Pemberitaan Kelembagaan BSN di Website dan Media Massa	1.000 Berita	921 Berita	92%
o. Jumlah keikutsertaan pameran BSN	5 Kali	16 Kali	312%
p. Jumlah koordinasi kelembagaan dan antar lembaga	19 Kali	19 Kali	100%
q. Jumlah dokumen laporan tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tahun 2015 pencapaian sasaran terwujudnya Terwujudnya Paket Publikasi Kelembagaan dari 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan target yang tidak mencapai 100% adalah Jumlah Pemberitaan Kelembagaan BSN di Website dan Media Massa yang ditargetkan 1.000 berita namun sampai dengan akhir Tahun 2015 hanya mencapai 921 berita atau sebesar 92%.

Penyebab dari tidaknya indikator kinerja diatas tidak melampaui target yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 ini disebabkan :

- a) Tidak optimalnya kegiatan penghimpunan informasi kegiatan strategis unit kerja di BSN, dan
- b) Pemotongan/pengalihan anggaran peliputan yang menyebabkan kendala dalam melakukan liputan kegiatan strategis BSN.

Sementara itu langkah – langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2016 untuk memperbaiki indikator kinerja yang belum mencapai target ini antara lain :

- 1) Membuat Memorandum ke seluruh unit kerja tentang permohonan informasi strategis unit kerja yang dapat diliput atau diberitakan melalui web BSN atau media massa lainnya sehingga dapat dibuatkan perencanaannya di awal tahun.
- 2) Mengirimkan formulir pengumpulan informasi kegiatan unit kerja lebih awal yakni pada hari Jum'at pagi yang diharapkan sudah terkumpul kembali di Humas sore hari.
- 3) Menyusun siaran pers sedikitnya 2 minggu sekali.
- 4) Mengoptimalkan artikel tentang BSN di berbagai saluran media massa di luar BSN seperti The Majalah Quality, Majalah Iptek, dan Terbitan Internal Pemprov DKI, terbitan Internal Kementerian Koperasi dan UKM.

Di Tahun 2015 pencapaian yang telah dicapai oleh Biro Hukum, Organisasi dan Humas khususnya di Bagian Humas antara lain :

- ✓ Telah dilakukannya kegiatan Pameran sebanyak 12 kali yaitu :

<b>Nama Pameran</b>	<b>Pelaksanaan</b>
1. Pameran dalam rangka penandatanganan MoU antara BSN dengan Kemenkop UKM	3 Maret 2015
2. Pameran dalam rangka Seminar IAPMO di Jakarta	18 Maret 2015
3. Pameran Agrinex di Jakarta	19 – 22 Maret 2015
4. Pameran Pesta Rakyat (TDA) di Jakarta	3 – 5 April 2015
5. Pameran Kemenkes di Jakarta	7 April 2015
6. Pameran Perdagangan di Semarang	21 – 24 Mei 2015
7. Pameran HARKOPNAS di Kupang	11 – 14 Juni 2015
8. Pameran Ritek (Ritech Expo) di Jakarta	7 – 10 Agustus 2015
9. Pameran Perdagangan di Mataram	20 – 23 Agustus 2015
10. Pameran Bahari di Surabaya	3 – 6 September 2015
11. Pameran SMESCO (SMESCO Festival) di Jakarta	1 – 4 Oktober 2015
12. Pameran PSCS di Malang	2 – 4 Oktober 2015
13. LIPI Expo di Jakarta	8 – 11 Oktober 2015
14. Pameran LAN di Jakarta	29 Oktober 2015

- ✓ Terlaksananya koordinasi kelembagaan dan antar lembaga yaitu dengan Komisi VI DPR – RI, Rapat pimpinan Eselon I, II dan III, DPRD Komisi III Propinsi Bangka Belitung, Peserta Diklat PIM IV LAN Propinsi Aceh.
- ✓ Terlaksananya kegiatan Bakohumas di BSN yang dihadiri kurang lebih 100 anggota bakohumas pusat. Kegiatan Bakohumas di BSN ini mengambil tema tentang Undang – undang No.20 Tahun 2014 tentang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta.
- ✓ Tersusunnya laporan Tahunan Kelembagaan BSN Tahun 2014.

<b>SASARAN</b>  <b>5</b>	<b>Tersusunnya Laporan Capaian Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi</b>
--------------------------------	--

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur Tersusunnya Laporan Capaian Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi

**Tabel III.6 Capaian Kinerja Sasaran 5**

Indikator Kinerja	Capaian 2015		
	Target	Realisasi	Capaian
r. Jumlah laporan capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	89%
s. Jumlah laporan hasil Survei evaluasi kelembagaan	1 Laporan	1 Laporan	89%

Tahun 2015 pencapaian sasaran Tersusunnya Laporan Capaian Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi untuk kedua indikator kinerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 ini yaitu 100%, hal ini disebabkan karena :

- a) Beberapa program Reformasi Birokrasi (RB) yang belum dilaksanakan sesuai rencana
- b) Setiap kegiatan yang telah dianggarkan untuk melaksanakan Program RB para PIC lebih memprioritaskan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dialokasikan di unit kerjanya sehingga anggaran yang telah disediakan pada Program RB tidak digunakan.

Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2015 pencapaian dari kedua indikator kinerja diatas adalah sebesar 89% dari target penetapan 100%

Oleh karena itu Tahun 2016 Biro HOH sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja tersebut diatas akan dilakukan :

- 1) Penguatan koordinasi dengan Kelompok Kerja RB yang telah dibentuk agar pelaksanaan kegiatannya berjalan
- 2) Berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran) agar Penganggaran RB dialokasikan di unit kerja PIC program.

### III.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2015 ini Biro HOH BSN didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015. Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-084.01.1.613104/2015 tanggal 14 Nopember 2014, pagu anggaran Biro HOH BSN sebesar Rp. 17.613.110.000,- dan realisasi anggaran Biro HOH BSN Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 15.253.451.848,- atau sebesar 86.60%. Pagu dan realisasi anggaran Biro HOH BSN Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.7 Pagu dan Realisasi Anggaran Biro HOH BSN TA. 2015**

*Dalam rupiah*

No	Uraian	2015		
		Pagu	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Bagian Hukum</b>	<b>4.273.110.000</b>	<b>4.115.492.352</b>	<b>80.46%</b>
	a. Produk Hukum	273.110.000	206.360.900	
	b. Terwujudnya Peraturan perundang - undangan dibidang standarisasi dan penilaian kesesuaian	4.000.000.000	3.414.242.350	
<b>2</b>	<b>Bagian Organisasi dan Kepegawaian</b>	<b>10.100.000.000</b>	<b>8.946.539.044</b>	<b>88.57%</b>
	a. Terwujudnya Paket Pengembangan SDM sesuai analis kebutuhan	5.100.000.000	4.576.562.657	
	b. Tersusunnya Laporan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5.000.000.000	4.369.976.387	
<b>3</b>	<b>Bagian Humas</b>	<b>3.240.000.000</b>	<b>2.686.309.554</b>	<b>83.00%</b>
	a. Paket Publikasi Kelembagaan Yang berkualitas	3.240.000.000	2.686.309.554	
	<b>Jumlah</b>	<b>17.613.110.000</b>	<b>15.253.451.848</b>	<b>86.60%</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

**L**aporan akuntabilitas kinerja Biro Hukum, Organisasi, dan Humas (HOH) BSN Tahun 2015 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Biro HOH Tahun 2015 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Biro HOH BSN Tahun 2015, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Biro HOH BSN sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas fungsi Biro HOH BSN sebagai fasilitasi dan koordinasi.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Biro HOH BSN di tahun-tahun berikutnya.